



**BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI SOLUSI
PEMBERANTASAN KEMISKINAN DI DAERAH PEDESAAN
UNTUK MENYONGSONG SDGS TAHUN 2030**

**KARYA ILMIAH YANG DIAJUKAN UNTUK MENGIKUTI
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**OLEH
HILYA AINI
165311015
D3-BAHASA INGGRIS**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
BANDUNG, 2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Karya Tulis	: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Solusi Pemberantasan Kemiskinan di Daerah Pedesaan untuk Menyongsong SDGs Tahun 2030
Bidang Karya Tulis	: Bahasa
Nama	: Hilya Aini
NIM	: 165311015
Program Studi	: D-3 Bahasa Inggris
Jurusan	: Bahasa Inggris
Politeknik	: Politeknik Negeri Bandung
Dosen Pembimbing	: Dra. Lina Meilinda, M. Hum.
NIP	: 196905251994032001

Bandung 16 April 2019

Dosen Pembimbing,

Dra. Lina Meilinda, M. Hum.

NIP 196905251994032001

Mahasiswa,

Hilya Aini

165311015



Pimpinan Bidang Kemahasiswaan PT

Harita Nurwahyu Chamidi, LRSC., M.T.

NIP 196601111994031002

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah ini ditulis untuk memenuhi persyaratan mengikuti Pemilihan Mahasiswa Berprestasi tingkat Politeknik Negeri Bandung.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, ada banyak pihak yang telah berjasa membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan dan Manfaat	5
1.4.1 Tujuan	5
1.4.2 Manfaat	5
1.5 Metode Produksi	5
1.5.1 Metode pengumpulan data	5
1.5.2 Metode penggunaan data	6
1.6 Sistematika Karya Tulis Ilmiah.....	6
BAB II.....	7
TELAAH PUSTAKA	7
2.1 Telaah Pustaka	7
2.2 Landasan Teori.....	7
2.2.1 Buku Panduan	8
2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	8
BAB III	9
DESKRIPSI PRODUK.....	9
3.1 Karakteristik Produk	9

3.1.1 Pembaca dan tujuan.....	9
3.1.2 Konten dan tema	9
3.1.3 <i>Tone</i> dan <i>mood</i>	9
3.1.4 Gaya bahasa	10
3.1.5 Struktur.....	10
3.2 Implementasi Produk	10
BAB IV	11
PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN.....	11
4.1 Rencana Pengujian Produk	11
4.1.1 Menjadikan buku panduan ini sebagai buku sumber pelatihan	11
4.2 Kemanfaatan Produk.....	12
BAB V.....	13
PENUTUP.....	13
5.1 Simpulan	13
5.2 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sampel Buku

BAB I

PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan karya ilmiah mengenai Badan Usaha Milik (BUMDes) yang bisa dijadikan solusi pemberantasan kemiskinan di daerah pedesaan untuk menyongsong *Sustainable Development Goals* tahun 2030. Pada bab ini, penulis akan memaparkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, manfaat, metode produksi dan sistematika karya ilmiah.

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusun 17 tujuan global yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau disebut juga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan target untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan bisa dicapai pada tahun 2030. Tujuan-tujuan ini dibuat untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang meliputi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim. Mengacu pada ketujuh belas tujuan ini, seluruh masyarakat dunia dan pemerintah harus bekerja sama untuk membangun sebuah masa depan yang lebih baik untuk kita semua.

Salah satu tujuan dari SDGs adalah memberantas kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun. Menurut Bank Dunia (2018), ada dua jenis kemiskinan yaitu kemiskinan ekstrim dan kemiskinan moderat. Kemiskinan ekstrim adalah hidup dengan pendapatan kurang dari US\$1,90 per hari, dan kemiskinan moderat adalah hidup dengan pendapatan kurang dari US\$3,10 per hari (Bank Dunia, 2018). Persentase kemiskinan ekstrim global adalah 10% dari populasi dunia yang berarti 736 juta jiwa hidup dalam kemiskinan ekstrim (Bank Dunia, 2018). Definisi lain dari kemiskinan diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS (2018), kemiskinan merupakan ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diukur dengan pengeluaran (Badan Pusat Statistik, 2018). Jadi, menurut BPS (2018), orang miskin merupakan penduduk yang mempunyai rata-rata

pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan atau kurang dari Rp401.220 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik, 2018). Di Indonesia, sampai Maret 2018, angka kemiskinan mencapai 25,95 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018). Populasi miskin di daerah perkotaan sebanyak 10 juta jiwa, dan populasi miskin di daerah pedesaan sebanyak 15,81 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018). Dari data di atas, bisa dilihat bahwa angka kemiskinan di daerah pedesaan lebih besar di daerah perkotaan.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro (TEMPO.CO, 2017), dua penyebab utama ketimpangan ekonomi di daerah pedesaan dan perkotaan adalah ketimpangan pada kualitas pekerjaan dan ketimpangan pendapatan serta aset. Di daerah pedesaan, masyarakat terjebak dengan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia (TEMPO.CO, 2017). Kesempatan kerja di daerah perkotaan dan pedesaan tidak seimbang (TEMPO.CO, 2017). Di daerah perkotaan, banyak lapangan pekerjaan yang tersedia karena perusahaan-perusahaan besar yang menyerap banyak tenaga kerja berada di daerah perkotaan (TEMPO.CO, 2017). Kualitas pekerjaan dan upah yang didapatkan pun berbeda. Kualitas pekerjaan dan upah yang didapatkan di daerah pedesaan relatif sangat rendah dan karena hal tersebut mereka sulit untuk menaikkan taraf hidup mereka (TEMPO.CO, 2017).

Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan memberantas kemiskinan, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan yang disebut desentralisasi atau otonomi daerah. Kebijakan ini berada di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Menurut Ferizaldi (2016), desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah supaya mereka bisa mengatur daerahnya masing-masing. Dibawah kebijakan ini, pemerintah pusat menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendirikan badan-badan usaha yaitu dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa di daerahnya. Tujuan didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan

serta pemerataan ekonomi pedesaan. Salah satu contoh daerah yang sukses mengimplementasikan kebijakan ini adalah Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten mempunyai satu desa yang maju karena adanya sebuah Badan Usaha Milik Desa yang sukses yaitu Desa Ponggok.

Ponggok merupakan sebuah desa yang terkenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sukses yang disebut BUMDes Tirta Mandiri. Dua belas tahun yang lalu, sebelum didirikannya BUMDes Tirta Mandiri, Desa Ponggok merupakan sebuah desa tertinggal. Desa tertinggal merupakan sebuah desa yang telah dikembangkan bersama-sama dengan desa-desa lain namun karena berbagai sebab desa tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan sehingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya tetap rendah (Soetomo, 2006:277-278). Namun, sekarang Desa Ponggok merupakan sebuah desa maju dan kaya dengan pendapatan milyaran per tahun. Pada tahun 2017, pendapatan asli Desa Ponggok sebesar 3,9 milyar (Mulyono, 2018). Hal tersebut dikarenakan pemerintah Desa Ponggok beserta masyarakatnya sukses mengelola sebuah BUMDes yang disebut BUMDes Tirta Mandiri. Keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri dalam membangun perekonomian Desa Ponggok menjadikan BUMDes Tirta Mandiri sebagai pemenang penghargaan pengelolaan BUMDes terbaik kategori Desa Wisata Pemberdaya Masyarakat (Palupi, 2018). Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementrian Desa PDTT dalam ajang Expo BUMDes Nusantara 2017 di Bukittinggi, Sumatra Barat (Palupi, 2018).

Oleh karena hal-hal tersebut, gagasan pendirian dan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan cara pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk diimplementasikan. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat membantu desanya dalam meningkatkan perekonomian sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Desa Ponggok melalui BUMDes Tirta Mandiri yang begitu sukses seperti yang telah dijelaskan dalam uraian di atas. Dengan kata lain, berdasarkan paparan di atas, pendirian dan pengelolaan BUMDes dengan pemberdayaan

masyarakat dapat dijadikan solusi pemberantasan kemiskinan di daerah pedesaan untuk menyongsong SDGs tahun 2030.

1.2 Identifikasi Masalah

Dikeluarkannya kebijakan pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan. Namun, kebijakan ini belum maksimal karena tidak semua desa bisa berhasil dalam mendirikan dan mengelola BUMDes sehingga tujuan-tujuan BUMDes belum dapat dicapai. Menurut Sudaryana (2016), beberapa penyebab permasalahan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah lemahnya sumber daya manusia, rendahnya kualitas manajemen, dan rendahnya kualitas profesionalisme (Sudaryana, 2016). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, panduan tentang bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes yang baik dan benar supaya bisa sukses seperti BUMDes Tirta Mandiri sangat dibutuhkan. Dengan adanya panduan, pendirian dan pengelolaan BUMDes bisa dijalankan dengan baik dan benar sehingga BUMDes tersebut bisa sukses seperti BUMDes Tirta Mandiri milik Desa Ponggok.

Keberhasilan Desa Ponggok dalam mendirikan dan mengelola BUMDes Tirta Mandiri menjadikan Desa Ponggok layak untuk dijadikan sebagai contoh pendiri dan pengelola BUMDes yang sukses. Maka dari itu, gagasan yang diusulkan untuk penyelesaian masalah adalah pembuatan buku panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes yang mengacu pada pendirian dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri milik Desa Ponggok. Buku panduan yang disusun berdasarkan kiat-kiat sebuah desa yang telah berhasil diharapkan bisa membantu pemerintah desa dalam mendirikan dan mengelola sebuah BUMDes sehingga bisa menjadi sukses. Adanya BUMDes yang sukses bisa membantu meningkatkan perekonomian sebuah desa sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan seperti yang telah ditargetkan dalam SDGs.

1.3 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini:

1. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendirikan BUMDes sehingga dapat menjadi BUMDes yang sukses?
2. Kebijakan apa yang perlu diterapkan agar BUMDes yang dikelola menjadi sukses?

1.4 Tujuan dan Manfaat

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari penulisan buku panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes.

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari penulisan buku panduan ini adalah untuk membantu pemerintah desa dalam mendirikan dan mengelola BUMDes sehingga BUMDes tersebut bisa sukses dan menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian dan desa kesejahteraan masyarakatnya.

1.4.2 Manfaat

Manfaat yang bisa didapat dari penulisan buku panduan ini adalah pemerintah desa mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mendirikan dan mengelola BUMDes sehingga bisa menjadi sukses seperti BUMDes Tirta Mandiri milik Desa Ponggok.

1.5 Metode Produksi

Metode produksi dari produk ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah metode pengumpulan data, dan bagian kedua adalah metode penggunaan data.

1.5.1 Metode pengumpulan data

Dua metode yang bisa digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dipercaya. Ada dua sumber yang akan diwawancarai: kepala Desa Ponggok dan direktur BUMDes Tirta Mandiri. Studi pustaka dilakukan untuk mencari informasi tambahan yang mungkin tidak didapatkan saat wawancara.

1.5.2 Metode penggunaan data

Dalam penulisan buku ini, ada beberapa tahap penulisan yaitu penulisan draft awal, *editing*, *revising*, dan penulisan draft akhir. Tahap awal dari penulisan adalah penulisan draft awal. Penulisan draft awal ini harus sesuai dengan *outline* dari buku yang akan dibuat. Tahap kedua dari penulisan adalah *editing*. Hal-hal yang diperiksa saat proses *editing* diantaranya adalah alur pemikiran, koherensi dan konsistensi, dan kesesuaian informasi yang disampaikan dengan tujuan penulisan. Tahap ketiga dari penulisan adalah *revising*. Pada tahap ini, semua kesalahan yang ditemukan pada saat proses *editing* diperbaiki. Setelah draft awal diedit dan direvisi, tahap selanjutnya adalah menulis draft akhir.

1.6 Sistematika Karya Tulis Ilmiah

Karya tulis ini dibagi menjadi lima bab: bab pendahuluan, telaah pustaka, deskripsi produk, pengujian dan pembahasan, dan penutup. Bab pendahuluan memaparkan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Bab telaah pustaka memaparkan tentang landasan teori dan pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Bab deskripsi produk memaparkan tentang karakteristik produk dan implementasi produk. Bab pengujian dan pembahasan memaparkan tentang rencana pengujian produk dan kemanfaatan produk. Bab lima memaparkan tentang simpulan dan saran.

Demikian penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode produksi, dan sistematika karya tulis ilmiah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa pemecahan masalah yang pernah dilakukan dan beberapa celah untuk melakukan peninjauan lebih jauh mengenai masalah yang sedang dikaji. Penulis juga akan memaparkan tentang landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji.

2.1 Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan untuk mencari tahu konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji serta uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu kekuatan yang dapat dicontoh dan kelemahan yang perlu dihindari. Pada telaah pustaka ini, ada tiga sumber yang dikaji; dua artikel jurnal dan satu tesis.

Dari sumber yang pertama, hal yang dapat dicontoh adalah pembahasan mengenai peran-peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian sebuah desa (Srirejeki, 2018). Dari sumber kedua, hal yang dapat dicontoh adalah pembahasan mengenai permasalahan dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes seperti lemahnya sumber daya manusia, rendahnya kualitas manajemen, penguasaan teknologi, dan profesionalisme (Sudaryana, 2016). Kelemahan yang perlu dihindari dari sumber pertama dan kedua adalah tidak adanya contoh nyata yang diberikan. Dari sumber ketiga, hal yang dapat dicontoh adalah penerapan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat (Santoso, 2017).

2.2 Landasan Teori

Dalam penulisan buku panduan ini, ada beberapa teori yang digunakan. Teori-teori tersebut adalah teori mengenai buku panduan dan deskripsi mengenai BUMDes.

2.2.1 Buku Panduan

Menurut Imran (2014), buku panduan merupakan sebuah buku yang berisi pokok bahasan mengenai suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk petunjuk dalam penerapan praktiknya. Menurut Hodgson (2007), ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat membuat sebuah buku panduan. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan.

1. Buku panduan harus mudah dimengerti (Hodgson, 2007).
2. Buku panduan harus menjelaskan langkah demi langkah (Hodgson, 2007).
3. Buku panduan harus menjelaskan fungsi-fungsi secara detail (Hodgson, 2007).
4. Buku panduan jangan dibuat terlalu besar dan tebal (Hodgson, 2007).

Berdasarkan dari definisi di atas, buku panduan ini akan membahas mengenai BUMDes agar bisa digunakan sebagai petunjuk dalam penerapan pendirian dan pengelolaan BUMDes. pembuatan buku panduan ini juga akan memperhatikan hal-hal yang perlu dihindari dalam pembuatan sebuah buku panduan.

2.2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan BUMDes sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan.

Demikian penjelasan mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang relevan beserta dengan pembahasan mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan.

BAB III

DESKRIPSI PRODUK

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai karakteristik produk yang terdiri dari pembaca dan tujuan, konten dan tema, *tone* dan *mood*, gaya bahasa, dan struktur. Selain itu, akan dijelaskan juga mengenai implementasi dari produk.

3.1 Karakteristik Produk

Menurut McIntyre dan Pruzinsky (2019), ada lima elemen utama yang dimiliki setiap teks: pembaca dan tujuan, konten dan tema, nada dan suasana hati, *stylistic devices* dan struktur.

3.1.1 Pembaca dan tujuan

Target pembaca dari buku ini adalah para kepala desa dan direktur BUMDes. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan informasi tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes yang sukses yang mengacu kepada pendirian dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri milik Desa Ponggok. Buku ini diharapkan dapat membantu kepala desa dan direktur BUMDes yang lainnya dalam mendirikan dan mengelola BUMDes sehingga bisa menjadi BUMDes yang sukses.

3.1.2 Konten dan tema

Tema buku ini adalah Badan Usaha Milik Desa bisa dijadikan solusi untuk pemberantasan kemiskinan di daerah pedesaan. Konten dari buku ini adalah informasi yang memuat panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes yang mengacu pada pendirian dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri milik Desa Ponggok.

3.1.3 *Tone* dan *mood*

Tone yang digunakan untuk menulis buku ini adalah formal, memuji dan memberi saran. Dengan membaca buku ini, pembaca diharapkan bisa merasa tertarik dan merasa ingin tahu sehingga ingin melakukannya.

3.1.4 Gaya bahasa

Untuk menulis sebuah buku yang baik, beberapa teknik dan gaya penulisan digunakan. Teknik penulisan yang digunakan adalah deskriptif, ekspositoris, prosedur. Gaya penulisan yang digunakan dalam buku ini adalah kalimat perintah, *hyphopora*, dan paralelisme.

3.1.5 Struktur

Buku ini terdiri akan terdiri dua bagian. Bagian pertama akan memberikan informasi mengenai Desa Ponggok. Informasi yang akan disampaikan adalah informasi mengenai gambaran umum, keadaan Desa Ponggok saat masih menjadi desa tertinggal, keadaan Desa Ponggok setelah menjadi desa yang mandiri, dan kunci kesuksesan Desa Ponggok. Bagian kedua akan memberikan informasi mengenai BUMDes Tirta Mandiri. Informasi yang akan disampaikan mencakup pendirian, pengelolaan, unit usaha, dan kendala.

3.2 Implementasi Produk

Produk ini bisa diimplementasikan untuk daerah-daerah tertinggal di Indonesia terutama daerah yang belum memiliki BUMDes. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, ada 122 daerah yang ditetapkan pemerintah sebagai daerah tertinggal (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015). Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan produk ini: menjadikan buku ini sebagai buku sumber untuk pelatihan kepengurusan BUMDes yang dilakukan oleh Kemendes PDTT dan aparatur desa dan menyimpan buku ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda).

Demikian pembahasan mengenai karakteristik produk dan juga implementasi dari produk ini.

BAB IV

PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah rencana pengujian produk, dan bagian kedua adalah kemanfaatan produk dalam menunjang pembangunan yang relevan dengan SDGs tahun 2030.

4.1 Rencana Pengujian Produk

Dua cara yang bisa digunakan untuk menguji produk ini adalah meminta Kemendes PDTT dan aparatur desa untuk menjadikan buku panduan ini sebagai buku sumber yang digunakan dalam pelatihan pengurus BUMDes dan menyimpan buku ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda).

4.1.1 Menjadikan buku panduan ini sebagai buku sumber pelatihan

Cara yang pertama adalah meminta Kemendes PDTT dan aparatur desa untuk menjadikan buku panduan ini sebagai buku sumber yang digunakan dalam pelatihan pengurus BUMDes. Pelatihan keterampilan tentang manajemen pendirian dan pengelolaan BUMDes sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengurus BUMDes. Untuk mendukung pelatihan tersebut, buku panduan ini, yang disusun berdasarkan kiat-kiat sebuah desa yang telah berhasil, dapat dijadikan sebagai buku sumber untuk pelatihan pengurus BUMDes yang mungkin diselenggarakan oleh Kemendes PDTT atau aparatur desa.

4.1.2 Menyimpan buku ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda)

Cara kedua yang bisa dilakukan untuk menguji produk ini adalah dengan menyimpan buku ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda). Dalam jangka waktu yang ditentukan, bisa dilihat berapa banyak buku panduan ini

dipinjam oleh masyarakat. Dengan begitu, bisa diketahui antusiasme masyarakat terhadap informasi mengenai BUMDes atau badan usaha pada umumnya.

4.2 Kemanfaatan Produk

Menurut data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), dari total 74.957 desa di Indonesia, sudah terbentuk 41.000 ribu BUMDes yang berarti 64% dari total jumlah desa sudah memiliki BUMDes (Pertana, 2018). Namun, dari angka tersebut, hanya sedikit sekali jumlah BUMDes yang berhasil. Bahkan menurut Kemendes PDTT (2018), lebih dari setengah jumlah BUMDes yang ada mati suri (Kumparan, 2018). Hal tersebut diakibatkan oleh minimnya kemampuan mengelola BUMDes sehingga BUMDes di tanah air tidak berjalan sebagaimana mestinya (Kumparan, 2018).

Karena hal tersebut, panduan pendirian dan pengelolaan sangat dibutuhkan agar BUMDes bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan-tujuan BUMDes dapat dicapai. Dengan adanya buku panduan yang aplikatif, kemampuan mendirikan dan mengelola BUMDes bisa ditingkatkan karena buku panduan tersebut akan menjadi pendamping untuk memandu pendirian dan pengelolaan BUMDes mulai dari tahap persiapan pendirian sampai dengan tahap pengembangan.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa kemanfaatan produk ini dalam menunjang tujuan pembangunan dalam SDGs adalah untuk memberantas kemiskinan dengan memanfaatkan BUMDes sebagai alat untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menjadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi pedesaan.

Demikian penjelasan mengenai rencana pengujian terhadap produk dan analisis kemanfaatan produk dalam menunjang pembangunan yang relevan dengan SDGs tahun 2030.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran untuk pemanfaatan serta komersialisasi produk yang akan dihasilkan.

5.1 Simpulan

Ketimpangan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh dua faktor utama yaitu ketimpangan pada kualitas pekerjaan dan ketimpangan pendapatan serta aset. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendirian BUMDes. Tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa. Namun, kebijakan ini belum bisa diterapkan secara maksimal karena ada banyak tantangan yang harus dilewati untuk bisa mendirikan dan mengelola sebuah BUMDes. Oleh karena itu, sebuah panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan. Dengan adanya sebuah buku panduan, BUMDes bisa didirikan dan dikelola dengan baik dan benar sehingga bisa menjadi BUMDes yang sukses yang bisa menjadi alat untuk membangun perekonomian desa. Buku panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes ini mengacu pada pendirian dan pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri milik Desa Pongkok karena sudah terbukti keberhasilannya.

5.2 Saran

Berikut ini adalah saran untuk pemanfaatan dan komersialisasi dari produk ini.

1. Buku panduan ini dapat dijadikan buku sumber untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT dan aparat desa.
2. Buku panduan ini dapat dipublikasikan juga untuk umum sehingga masyarakat luas bisa membaca dan menjadikan buku ini sebagai panduan jika ingin mendirikan sebuah badan usaha.

Demikian simpulan dan saran yang diberikan untuk pemanfaatan dan komersialisasi dari produk yang akan dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashikuzzaman, M., 2014. *Reference book: Its characteristics and types*. [Online]
Available at: www.lisbdnet.com/reference-book-its-characteristics-and/
[Accessed 5 Maret 2019].
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Penduduk Miskin*. [Online]
Available at: <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
[Accessed 25 Februari 2019].
- Bank Dunia, 2018. *Understanding Poverty*. [Online]
Available at: <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>
[Accessed 25 Februari 2019].
- Hodgson, P., 2007. *Tips for writing user manuals*. [Online]
Available at: <https://www.userfocus.co.uk/articles/usermanuals.html#Anchor-General-49575>
[Accessed 5 Maret 2019].
- Imran, S., 2014. *Jenis terbitan buku di perpustakaan*. [Online]
Available at: <https://ilmu-pendidikan.net/pustaka/buku/jenis-terbitan-buku-di-perpustakaan>
[Accessed 6 Maret 2019].
- Kumparan, 2018. *Kemendes PDTT: Separuh Lebih BUMDes di Indonesia Mati Suri*. [Online]
Available at: <https://m.kumparan.com/tugujogja/kemendes-pdtt-separuh-lebih-bumdes-di-indonesia-mati-suri-27431110790555989>
[Accessed 2 Maret 2019].
- McIntyre, D. & Pruzinsky, T., 2019. *English A: Language & Literature*. [Online]
Available at: www.thinkib.net/englishalanglit/page/11116/the-big-5
[Accessed 26 Februari 2019].
- Mulyono, J., 2018. *Kades Ponggok Sulap Desa Jadi Kaya* [Interview] (24 Oktober 2018).

- Palupi, D. H., 2018. *BUMDes Tirta Mandiri Menembus Batas*. [Online]
Available at: <https://swa.co.id/swa/trends/bumdes-tirta-mandiri-menembus-batas>
[Accessed 28 Februari 2019].
- Pertana, P. R., 2018. *RI Punya 41.000 BUMDes, Tersebar di 74.957 Desa*. [Online]
Available at: <https://detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4318416/ri-punya-41000-bumdes-tersebar-di-74957-desa>
[Accessed 2 Maret 2019].
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007. *Tujuan Pendirian BUMDes*.
Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Santoso, A. B., 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Aset: Studi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten*,
Yogyakarta: Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015. *122 Daerah Ini Ditetapkan Pemerintah Sebagai Daerah Tertinggal 2015-2019*. [Online]
Available at: <https://setkab.go.id/122-daerah-ini-ditetapkan-pemerintah-sebagai-daerah-tertinggal-2015-2019/>
[Accessed 1 Maret 2019].
- Soetomo, 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Srirejeki, K., 2018. Empowering the role of village-owned enterprises (BUMDes) for rural development: Case of Indonesia. *Journal of Accounting*, 20(1), pp. 5-10.
- Sudaryana, B., 2016. The Model of Development Policy Implementation of Village Owned Enterprises in Indonesia. *Advances in Social Sciences, Education and Humanitarian Research*, Volume 81, pp. 23-29.
- TEMPO.CO, 2017. *Ketimpangan Ekonomi di Indonesia, Menppenas: Ada Empat Penyebab*. [Online]
Available at:
<https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/907466/ketimpangan-ekonomi-di-indonesia-menppenas-ada-empat-penyebab>
[Accessed 28 Februari 2019].

HILYA AINI

Ponggok Village



**From Disadvantaged Village
to Top Tourist Destination**

3 BAB

Ponggok Sebagai Desa Mandiri

Sejak Desa Ponggok dipimpin oleh Kepala Desa Junaedhi Mulyono pada tahun 2007, Desa Ponggok mengalami kemajuan yang sangat pesat. Banyak sekali pembangunan yang telah dilakukan oleh Bapak Junaedhi Mulyono sehingga perkembangan-perkembangan mulai terlihat. Desa Ponggok yang tadinya merupakan sebuah desa tertinggal dan termiskin di Kecamatan Polanharjo sekarang menjadi sebuah desa yang maju dan mandiri. Berikut ini adalah kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Desa Ponggok dalam semua bidang.

A. Bidang Pemerintahan

Desa Ponggok yang tadinya tidak memiliki sarana dan prasarana untuk kegiatan pemerintahan desa sehingga kegiatan tersebut harus dijalankan di rumah masing-masing perangkat desa sekarang memiliki sebuah kantor desa yang besar dan megah. Dengan adanya sebuah kantor desa, pelayanan kepada masyarakat pun menjadi lebih optimal karena kerjasama antar perangkat desa menjadi lebih baik. Kualitas perangkat desa

pun telah meningkat karena rata-rata merupakan sarjana.



Kantor Desa Ponggok

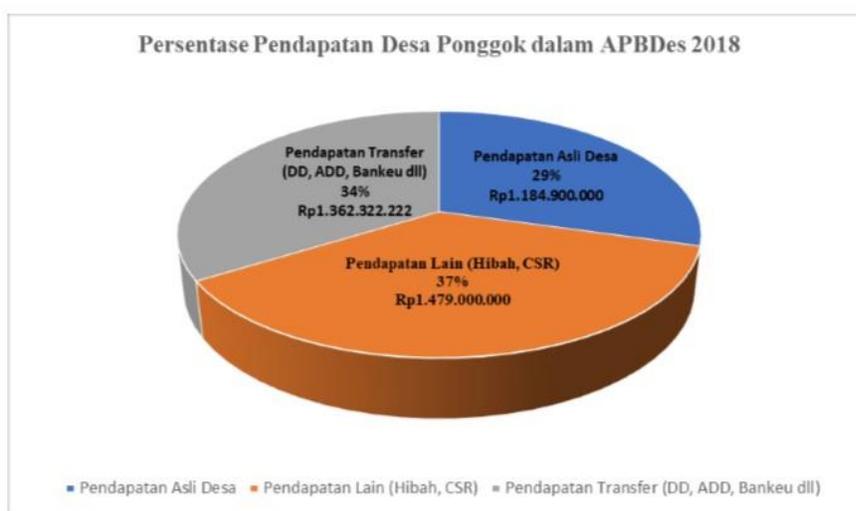
B. Bidang Infrastruktur

Kondisi infrastruktur Desa Ponggok saat ini sudah sangat baik. Selama satu dekade terakhir ini, pemerintah Desa Ponggok telah berusaha keras untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur guna mendukung proses perkembangan dan kemajuan desa. Akses transportasi seperti jalan sudah diperbaiki sehingga tidak ada lagi jalan-jalan rusak. Fasilitas air bersih dan irigasi sudah dikelola dengan baik. Fasilitas publik seperti sarana pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial pun sudah memadai.

C. Bidang Ekonomi

Dengan menyandang status desa maju dan mandiri, tentu saja perekonomian Desa Ponggok sudah maju dengan pesat. Desa yang

tidak memiliki kas desa dan hanya memiliki lahan produktif yang hanya menghasilkan rata-rata Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000 setiap tahunnya, sekarang telah menjadi desa yang kaya dengan pendapatan desa milyaran per tahun dan telah mampu menyediakan kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi masyarakat desanya. Jumlah pendapatan Desa Ponggok pada tahun 2018 adalah sebesar Rp4.026.222.222. Berikut ini adalah persentase pendapatan Desa Ponggok pada tahun 2018.



Persentase Pendapatan Desa Ponggok Tahun 2018

D. Bidang Sosial Budaya

Keadaan sosial dan budaya masyarakat Desa Ponggok sudah sangat meningkat. Pemerintah Desa Ponggok mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat terutama kesenjangan infrastruktur pemukiman. Pemerintah Desa Ponggok juga sudah mampu meningkatkan

semangat gotong royong masyarakatnya. Untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur pemukiman di antara masyarakatnya, pemerintah Desa Ponggok telah mengadakan program rehab rumah tidak layak huni dan pavingisasi jalan-jalan di pemukiman warga. Untuk program rehab rumah tidak layak huni, pemerintah Desa Ponggok menggelontorkan dana sebesar Rp100.000.000. Untuk program pavingisasi jalan-jalan di pemukiman warga, pemerintah Desa Ponggok menggelontorkan dana sebesar Rp197.264.750.

Selain program rehab rumah tidak layak huni, pemerintah Desa Ponggok juga mempunyai program sosial lainnya. Program sosial lain yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Ponggok yaitu memberikan perlindungan dan bantuan uang tunai kepada lansia. Bantuan yang disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan.

Selain mampu memberikan bantuan sosial untuk masyarakatnya, pemerintah Desa Ponggok telah berhasil memberdayakan masyarakatnya dan meningkatkan semangat gotong royong mereka. Masyarakat di Desa Ponggok sekarang memiliki jiwa gotong royong dan produktivitas yang tinggi. Contohnya, di Ponggok, ada kelompok masyarakat yang diberdayakan dan dilatih untuk menjadi produktif yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan lembaga yang didirikan warga desa yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap berkembangnya kepariwisataan di wilayah desa mereka. Kepariwisataan

ini diharapkan bakal meningkatkan pembangunan daerah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga desa. Pokdarwis bergerak secara swadaya artinya pengembangan kepariwisataan yang dilakukan di desa itu bersumber dari kekuatan desa sendiri dengan segala potensinya.

Desa Ponggok memiliki sebuah pokdarwis yang bernama Pokdarwis Wanua Tirta. Pokdarwis Wanua Tirta merupakan sebuah lembaga sosial formal yang memiliki Surat Keputusan dari Pemerintah Desa Ponggok. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk menggali potensi yang ada di Desa Ponggok dan untuk mempromosikan pariwisata yang ada sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Peran dan fungsi Pokdarwis Wanua Tirta yaitu mengenalkan Sapta Pesona, bertindak sebagai fasilitator bagi usaha-usaha masyarakat, bersama pemerintahan desa menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga lain (Perusahaan yang mempunyai CSR).

Pokdarwis Wanua Tirta dibagi menjadi enam kelompok kerja yaitu Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4, Pokja 5, dan Pokja 6. Masing-masing Pokja memiliki program kerja yang berbeda-beda. Pokja satu bertempat di RW 1 dengan jumlah anggota delapan orang dan memiliki jenis usaha budidaya ikan nila dan studi desa tentang perikanan. Pokja 2 bertempat di RW 2 dengan jumlah anggota delapan orang dan memiliki jenis usaha kuliner malam, namun Pokja 2 masih dalam tahap perencanaan dan belum beroperasi. Pokja 3 bertempat di RW 3 dengan jumlah anggota delapan orang dan memiliki jenis usaha budidaya ikan nila dan pemancingan. Pokja 4 bertempat di RW 4 dengan jumlah anggota sepuluh orang dan memiliki

jenis usaha pemanfaatan parit untuk budidaya ikan nila. Pokja 5 bertempat di RW 5 dengan anggota sepuluh orang dan memiliki jenis usaha wisata air yaitu pengelolaan Umbul Sigedang dan Kapilaler. Pokja 6 bertempat di RW 6 dengan jumlah anggota sepuluh orang dan memiliki jenis usaha penataan wisata riverside Kali Wiyu dan studi desa penataan lingkungan.

Sebagai sebuah lembaga sosial formal, Pokdarwis Wanua Tirta juga mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai seperti halnya lembaga lain. Visi Pokdarwis Wanua Tirta adalah terwujudnya pariwisata Ponggok yang berkuwalitas, berdaya saing, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Ponggok pada khususnya dan masyarakat sekitar Ponggok pada umumnya. Misi Pokdarwis Wanua Tirta adalah mengembangkan Industri Wisata demi terciptanya lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, mengkampanyekan Sapta Pesona (aman, tertib, sejuk, indah, ramah tamah, kenangan) kepada masyarakat, meningkatkan SDM masyarakat Ponggok terutama hal kepariwisataan, dan memanfaatkan atau menggali potensi SDA Ponggok dalam mendukung pariwisata sehingga kedepan bisa lebih baik.



Selain memiliki visi dan misi, Pokdarwis Wanua Tirta juga memiliki logo yang menjadi identitas kelompoknya. Berikut ini adalah logo Pokdarwis Wanua Tirta beserta dengan penjelasan artinya.

1. Tulisan WANUA TIRTA artinya desa air.
2. Gambar pohon artinya organisasi ini sangat mengutamakan lingkungan yang seimbang.
3. Gambar segi empat artinya perumahan yang layak bagi masyarakat.
4. Gambar air artinya organisasi ini sangat identik dengan sumber mat air yang mengalir alami.
5. Gambar ikan artinya Ponggok identik dengan ikan nila.
6. Gambar tali terikat artinya anggota pokdarwis seperti tali berkait.

Arti warna:

- a) Hijau adalah kesuburan, kesegaran, kedamaian dan keseimbangan.
- b) Coklat adalah keakraban dan rasa aman.
- c) Biru adalah stabil, kecerdasan, rasa percaya diri.
- d) Hitam adalah elegan, kemakmuran dan kecanggihan, independent.

E. Bidang Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Ponggok sudah sangat meningkat. Mayoritas penduduk Desa Ponggok merupakan lulusan SMA/SLTA yaitu sebanyak 741 orang atau 34,65% dari total penduduk Desa Ponggok. Jumlah sarjana di Desa Ponggok pun sudah cukup lumayan yaitu pada data monografi 2018, jumlah sarjana di Desa Ponggok sebanyak 187 orang atau 8,74% dari total penduduk Ponggok.

Selain tingkat pendidikan masyarakat yang meningkat, pemerintah Desa Ponggok juga sudah mampu memberikan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakatnya melalui program 'Satu Rumah Satu Sarjana'. Program ini diperuntukkan kepada masyarakat Desa Ponggok

yang sedang mengenyam pendidikan S1 di Perguruan Tinggi. Bantuan biaya pendidikan yang diberikan yaitu sebesar Rp300.000 per bulan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sarjana di Desa Ponggok agar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusianya karena sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

F. Bidang Kesehatan

Saat menjadi desa yang tertinggal, Desa Ponggok banyak mengalami permasalahan di bidang kesehatan seperti terbatasnya fasilitas dan sarana kesehatan tingkat desa, tidak adanya jaminan atau perlindungan kesehatan bagi warga miskin, dan rendahnya kesadaran akan kesehatan lingkungan. Sekarang, Desa Ponggok sudah mempunyai fasilitas dan sarana kesehatan tingkat desa yang memadai; Desa Ponggok mempunyai satu Polindes, satu Poliklinik atau Balai Pelayanan Masyarakat, dan satu apotik atau depot obat.

Selain sudah mampu menyediakan fasilitas dan sarana kesehatan tingkat desa yang memadai, pemerintah Desa Ponggok juga sudah mampu memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya lewat program 'Jaminan Kesehatan Desa' atau Jamkesdes. Pada program ini, pemerintah Desa Ponggok membayar premi BPJS warga desanya.

